



ZITAN M. NASYITHINGM

BUPATI Bandung H. Dadang M. Naser, **Kapolres** Bandung M. Nazly Harahap, dan **Kepala Kemenag** Kab. Bandung Dah Saefuloh memperlihatkan naskah MOU tentang pengawasan dana desa, di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Kab. Bandung, Jumat (3/11).

Mengawal Dana Desa

Polres dan Pemkab Teken MoU

SOREANG, (GM).-

Sebagai upaya preventif dalam mencegah penyelewengan Dana Desa (DD), pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan *memorandum of understanding* (MoU) bersama Kepolisian RI, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, S.H., M.I.P. menjelaskan permasalahan itu telah di-*breakdown* oleh pemerintah provinsi (pemprov) se-Indonesia dengan kapolda yang termasuk di Jawa Barat.

"Ini adalah *breakdown* MoU antara pemprov dengan kapolda, juga amanat nasional. Tujuannya agar dana desa yang diturunkan ke desa bisa terkawal, sebagai upaya preventif penyalahgunaan," ungkap bupati usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Bandung dan Polres Bandung tentang Penanganan Permasalahan Dana Desa dan Peningkatan SDM melalui program pembinaan dan pelatihan, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bandung di Gedung Moch. Toha Soreang, Jumat (3/11).

Bupati menegaskan, kerja sama tersebut jangan dianggap menakut-

nakuti. Pengawasan akan dilakukan aparat kepolisian mulai dari pembinaan untuk perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan dana desa.

"Secara teknis bentuknya kerja sama dan pembinaan, jadi nantinya akan dikawal bagaimana program pembangunan yang didanai DD tersebut. Misalnya kegiatan bumdes, pembangunan jalan atau infrastruktur bisa terencana bersama Babinkamtibmas dengan aparat desa. Hal itu tentunya untuk kepentingan masyarakat Kab. Bandung," tegasnya.

Bupati yang biasa disapa Kang DN ini mengingatkan kepada para kepala desa (kades) agar lebih memperhatikan akurasi DD untuk program pembangunan yang benar-benar dilaksanakan. "Maka melalui MoU ini pun akan menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran. Saya minta Babinkamtibmas dan kepala desa sama-sama mengawasi. Bukan berarti ada pelanggaran, tapi jangan sampai ada tumpang tindih penggunaan anggaran dengan kegiatan yang sama," terang bupati didampingi Asisten Pemerintahan, Yudi Haryanto.

Pembinaan

Sementara Kapolres Bandung, AKBP M. Nazly Harahap, S.I.K. meyakinkan para kepala desa bah-

wa MoU ini adalah bentuk kecintaan polisi terhadap pemerintahan desa dengan mengutamakan pencegahan, dibandingkan penindakan. "Secara teknis aparat akan mendampingi kades untuk bejalan bersama, sehingga ada pengawasan dalam penggunaan DD demi terwujudnya pembangunan untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Kapolres menekankan, agar para kades tidak ragu dengan ditandatanganinya MoU. "Kami menjanjikan akan melakukan pembinaan pada Babinkamtibmas, supaya bisa bekerja maksimal. Dengan niat mulia, tidak ada satu pun aparat yang menakuti. Saya tegaskan ini bukan seremonial saja. Ini serius, dan akan saya beri pelatihan Babinkamtibmas. Jangan sampai ada aparat yang main-main dalam pengawasan DD di wilayah saya apabila nanti tidak ingin ada konsekuensinya. Bila ada petugas main-main, saya tidak ragu memecatnya," tegas Nazly.

Pada kesempatan itu, dilakukan pula MoU antara Polres Bandung dengan Kementerian Agama Kab. Bandung tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dimasukkan dalam kurikulum satuan pendidikan madrasah ibtidaiah, tsanawiah, dan aliah. (B.122)**